

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (Renja)
KECAMATAN LIANG ANGGANG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 dapat dilaksanakan Implementasi dari Visi dan Misi Kota Banjarbaru, sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang, rencana kerja Kantor Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 diterbitkan sebagai normal, standar, prosedur, kreteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Kecamatan Liang Anggang pada tahun 2025.

Banjarbaru, Juli 2024
CAMAT LIANG ANGGANG,

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
Pembina
NIP. 19831229 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematis Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LIANG ANGGANG TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Liang Anggang Tahun Lalu	11
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	11
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Liang Anggang	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	41
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	44
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan	44
BAB V PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kecamatan Liang Anggang merupakan salah satu kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru, berdasarkan gradenya Kecamatan Liang Anggang termasuk pada tipe A yang mempunyai total luas sebesar 74.83 M2 atau sekitar 23,12 persen dari total luas Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk sebesar 47.398 jiwa pada tahun 2023. Kecamatan Liang Anggang terdiri atas 4 kelurahan yaitu, *Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kelurahan Landasan Ulin Barat, dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan* dan 81 RT serta 16 RW.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Kota Banjarbaru memiliki wewenang lebih luas dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan ditingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi Kewenangan Pusat dan Propinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Banjarbaru adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral.

Untuk mendorong pembangunan di Kota Banjarbaru dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh

elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru.

Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Banjarbaru akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru untuk menjadi kota yang unggul dibidang perdagangan, jasa, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Banjarbaru khususnya Kecamatan Liang Anggang.

1.2. Landasan Hukum

Kecamatan Liang Anggang terbentuk dari pemecahan/ pemekaran Kecamatan Landasan Ulin dengan Peraturan Daeran Kota Banjarbaru No. 04 Tahun 2007 Tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru Tanggal 10 Mei 2007.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru disebutkan bahwa kedudukan Pemerintah Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota.

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih menitikberatkan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagian Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dikelompokkan dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat, pertanahan dan perizinan.

Kemudian ditindak lanjuti lagi dengan Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pembuatan rencana strategis Kecamatan Liang Anggang untuk pengembangan Kota Banjarbaru ini dibuat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan *Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System)* dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif. Berikut ini gambaran keterkaitan antar dokumen menurut UU No.25 tahun 2004.

Secara Yuridis keberadaan Kecamatan Liang Anggang sebagai salah satu wilayah Kota Banjarbaru bersamaan dengan terbentuknya Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom berdasarkan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822).

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru disebutkan bahwa kedudukan Pemerintah Kecamatan merupakan Unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah mdan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota.

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih menitikberatkan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagian Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dikelompokkan dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat, pertanahan dan perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Kerja ini adalah untuk membangun sebuah Rencana Kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan *Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System)* yang sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. Rencana Kerja SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Berikut ini adalah tujuan adanya rencana kerja Kecamatan Liang Anggang yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif .
3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi.
4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan ditingkat Rukun Tetangga (RT) yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Banjarbaru untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh warga Kecamatan Liang Anggang.

5. Merumuskan sebuah dokumen Rencana Strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Liang Anggang supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.
6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
7. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai.
8. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Banjarbaru.
9. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
10. Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Melalui Kelurahan-Kelurahan sampai dengan ketinggian RT/RW

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Liang Anggang serta susunan garis besar isi dokumen

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LIANG ANGGANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Liang Anggang
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Liang Anggang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LIANG ANGGANG

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LIANG ANGGANG

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LIANG ANGGANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Liang Anggang Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2023 . Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renja Kecamatan Liang Anggang tahun 2023.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tahun 2023 yang lalu telah dianggarkan Dana Murni sebesar Rp 7.791.191.990,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 7.591.151.990,00 Belanja Modal Rp 200.000.000,00 yang terdiri dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Kerja di pertengahan tahun mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 8.882.401.640,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 7.904.935.640,00 dan Belanja Modal Rp. 977.466.000,00 yang terdiri dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Dari kegiatan tahun 2023 (sampai dengan triwulan IV) yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Liang Anggang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Realisasi keuangan dapat di diperoleh realisasi penyerapan Sub kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) sebesar Rp. 8.608.406.228,00 dengan pencapaian 96,92%
- Realisasi Belanja Modal dapat di diperoleh realisasi penyerapan sebesar Rp. 953.346.000,00 dengan pencapaian 97,53%

Tabel 2.1.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG TAHUN ANGGARAN 2023
KOTA BANJARBARU

SKPD : KECAMATAN LIANG ANGGANG

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Belanja Tidak Langsung	5.701.632.520	5.558.291.102	98,86	Terbayarnya Belanja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	
	Belanja Langsung							
I.	Perencanaan, Pengagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.880.000	91.610.000	96,55				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	89.880.000	86.610.000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisarm Relisasi mKinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.710.879.420	5.567.538.002	97,64				
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.701.632.520	5.558.291.102		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.000.000	5.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulan/Triwulan/Semester SKPD	4.246.900	4.246.900		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kauangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.698.000	22.554.839	99,36				
6.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.698.000	22.554.839		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100

IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.491.300	117.979.638	98,73				
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.604.500	17.034.500		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.369.800	51.118.700		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100
9.	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	5.766.000	5.765.500		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.998.000	1.998.000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	444 Eksemplar	444 Eksemplar	100
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.293.000	42.062.938		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100
V.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	702.466.000	681.286.500	96,98				
12.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.000.000	274.300.000		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100
13.	Pengadaan Mebel	48.896.000	44.800.000		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	6 Unit	100
14.	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	32.370.000	32.240.000		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dsediakan	3 Unit	3 Unit	100
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	278.000.000	277.000.000		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	100
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.200.000	52.946.000		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	100
VI.	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	191.401.020	150.409.037	78,58				
17.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.120.000	57.453.331		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan/ Bulan	- Jenis	100
18.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	125.281.020	92.955.706		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan/ Bulan	- Jenis	100
VII.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	167.640.000	163.423.862	97,48				
19.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.000.000	37.797.950		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7 Unit	100

20.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.300.000	50.105.912		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	6 Unit	6 Unit	100
21.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.090.000	2.090.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100
22.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	75.000.000	72.180.000		Terpeliharanya Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun	100
23.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	1.250.000	1.250.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ di Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit	100
VIII.	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ditingkat kecamatan	1.221.564.000	1.201.334.500	98,34				
24.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1.221.564.000	1.201.334.500		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	100
IX.	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	358.396.000	338.906.500	94,56				
25.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha	71.396.000	67.395.000		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
26.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	252.500.000	237.011.000		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100
27.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	34.500.000	34.500.000		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	100
X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.980.000	7.980.000	100				
28.	Evaluasi Kelurahan	7.980.000	7.980.000		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	100
XI.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	98.691.000	94.153.490	95,40				
29.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	98.691.000	94.153.490		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarkatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100
XII.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	186.314.900	175.529.900	94,21				
30.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	186.314.900	175.529.900		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100
TOTAL		8.618.244.80	8.425.001.650					

Realisasi capaian anggaran program/ kegiatan secara umum dikategorikan baik karena sebagian besar capaian realisasi anggaran lebih dari 90%.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tahun 2024 telah dianggarkan Dana Murni sebesar Rp 9.858.193.720,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.042.253.120,00 Belanja Modal Rp 815.940.600,00 yang terdiri dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Kerja di pertengahan tahun hanya mengalami perubahan pergeseran untuk menyesuaikan kegiatan yang sifatnya Bantuan Sosial untuk masyarakat di alihkan menjadi Kegiatan Swakelola tipe IV, serta merinci kegiatannya dengan standar SSH yang telah ditentukan di dalam SIPD Ri Tahun 2024.

Dari kegiatan tahun 2024 (sampai dengan triwulan II) yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Liang Anggang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Realisasi keuangan dapat di diperoleh realisasi penyerapan Sub kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.559.460.709,00 dengan pencapaian 46,25%

Formulir E.81 / Tabel 2.1.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indakor Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Income)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12				14 = 13/5 x 100%		15
				K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K	Rp	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		8.208.572.770	100%	6.667.112.796	100%	7.184.562.770	19,29	1.583.821.172	28,27	2.320.798.337	-	-	-	-	19,29	3.904.619.509							
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan kinerja tepat waktu	100%	271.399.750	100%	94.880.000	100%	271.399.750	16,64	45.165.700	23,94	64.980.000					16,64	110.145.700							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dibuat	100%	4.999.750	100%	5.000.000	100%	4.999.750	16,00	800.000	-	-					16,00	800.000							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	266.400.000	100%	89.880.000	100%	266.400.000	16,65	44.365.700	24,39	64.980.000					16,65	109.345.700							
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	100%	6.498.542.150	100%	5.710.879.420	100%	6.251.662.150	22,07	1.434.520.479	31,58	2.052.204.416					22,07	3.486.724.895							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.489.303.800	100%	5.701.632.520	100%	6.242.423.800	22,08	1.432.961.479	31,62	2.052.204.416					22,08	3.485.165.895							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100%	4.999.850	100%	5.000.000	100%	4.999.850	16,90	845.000	-	-					16,90	845.000							

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	4.238.500	100%	4.246.900	100%	4.238.500	16,85	714.000	-	-					16,85	714.000						
III		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.697.500	100%	22.554.839	100%	7.697.500	15,90	1.224.000	-	-					15,90	1.224.000						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	7.697.500	100%	22.554.839	100%	7.697.500	15,90	1.224.000	-	-					15,90	1.224.000						
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Administrasi Umum dan Pelayanan Publik	100%	227.482.300	100%	117.979.638	100%	227.482.300	8,48	19.300.030	44,32	100.822.736					8,48	120.122.766						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor selama setahun terpenuhi	100%	105.227.000	100%	17.034.500	100%	105.227.000	1,89	1.993.500	82,09	86.379.000					1,89	88.372.500						
		Penyediaan Barang Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama setahun	100%	70.259.500	100%	51.118.700	100%	70.259.500	13,34	9.374.000	5,98	4.200.000					13,34	13.574.000						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Menunjang Operasional Kantor	100%	5.765.800	100%	5.765.500	100%	5.765.800	-	-	-	-					-	-						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan baru	100%	1.980.000	100%	1.998.000	100%	1.980.000	20,20	400.000	-	-					20,20	400.000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah dapat terlaksana	100%	44.250.000	100%	42.062.938	100%	44.250.000	17,02	7.532.530	23,15	10.243.736					17,02	17.776.266						
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	100%	125.050.600	100%	406.986.000	100%	125.050.600	24,63	30.800.000	57,42	71.800.000					24,63	102.600.000						
		Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	100%	13.709.600	100%	44.800.000	100%	13.709.600	-	-	-	-					-	-						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	65.543.000	100%	32.240.000	100%	65.543.000	-	-	94,59	62.000.000					-	62.000.000						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	31.170.000	100%	277.000.000	100%	31.170.000	98,81	30.800.000	-	-					98,81	30.800.000						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	14.628.000	100%	52.946.000	100%	14.628.000	-	-	66,99	9.800.000					-	9.800.000						

VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Gedung Kantor	100%	199.681.020	100%	150.409.037	100%	199.681.020	17,65	35.244.001	5,18	10.339.185				17,65	45.583.186				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Listrik, Air OPD yang Terpenuhi	100%	68.400.000	100%	57.453.331	100%	68.400.000	23,36	15.977.339	8,68	5.939.185				23,36	21.916.524				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	100%	131.281.020	100%	92.955.706	100%	131.281.020	14,68	19.266.662	3,35	4.400.000				14,68	23.666.662				
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana Penunjang Gedung Kantor	100%	878.719.450	100%	163.423.862	100%	878.719.450	2,00	17.566.962	2,35	20.652.000				2,00	38.218.962				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Dalam Kondisi Layak dan Baik	100%	45.863.700	100%	37.797.950	100%	45.863.700	15,26	7.000.000	7,63	3.500.000				15,26	10.500.000				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Dalam Kondisi Layak dan Baik dan Dapat Digunakan	100%	98.705.750	100%	50.105.912	100%	98.705.750	10,71	10.566.962	9,88	9.752.000				10,71	20.318.962				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100%	2.000.000	100%	2.090.000	100%	2.000.000	-	-	-	-				-	-				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung dan bangunan dalam kondisi baik	100%	730.900.000	100%	72.180.000	100%	730.900.000	-	-	1,01	7.400.000				-	7.400.000				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung dan bangunan dalam kondisi baik	100%	1.250.000	100%	1.250.000	100%	1.250.000	-	-	-	-				-	-				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	meningkatkan pelayanan kegiatan di tingkat Kecamatan	100%	1.597.287.250	100%	1.540.240.500	100%	1.597.287.250	17,42	278.264.400	22,74	363.276.800				17,42	641.541.200				
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.597.287.250	100%	1.540.240.500	100%	1.597.287.250	16,71	266.956.500	21,85	349.068.000				16,71	616.024.500				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	1.479.204.000	100%	1.201.334.500	100%	1.479.204.000	18,05	266.956.500	23,60	349.068.000				18,05	616.024.500				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	100%	118.083.250	100%	338.906.000	100%	118.083.250	9,58	11.307.900	12,03	14.208.800				9,58	25.516.700				

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Di Laksanakan	100%	31.399.700	100%	67.395.000	100%	31.399.700	10,01	3.144.000	9,89	3.105.000					10,01	6.249.000					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	52.500.000	100%	237.011.000	100%	52.500.000	12,00	6.299.900	14,01	7.357.300					12,00	13.657.200					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	34.183.550	100%	34.500.000	100%	34.183.550	5,45	1.864.000	10,96	3.746.500					5,45	5.610.500					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pembinaan Kelurahan	100%	112.899.000	100%	102.133.490	100%	112.899.000	-	-	-	-					-	-					
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100%	7.968.000	100%	7.980.000	100%	7.968.000	-	-	-	-					-	-					
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	100%	104.931.000	100%	94.153.490	100%	104.931.000	-	-	-	-					-	-					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	104.931.000	100%	94.153.490	100%	104.931.000	-	-	-	-					-	-					
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Data Ketentrman dan Keteritban Umum yang Diverifikasi	100%	186.314.700	100%	175.529.900	100%	186.314.700	-	-	7,14	13.300.000					-	13.300.000					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Koordinasi Ketentrman dan Keteritban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	186.314.700	100%	175.529.900	100%	186.314.700	-	-	7,14	13.300.000					-	13.300.000					
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Ketentrman dan Keteritban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	186.314.700	100%	175.529.900	100%	186.314.700	-	-	7,14	13.300.000					-	13.300.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)										18,77%		27,06%						46,25%						
Predikat kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					9.918.759.020		8.309.486.786		9.858.193.720		1.862.085.572		2.684.075.137						4.559.460.709					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2021-2026 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Liang Anggang.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan.
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun analisis terhadap Pelayanan Kinerja di Kecamatan disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Liang Anggang
Kota Banjarbaru

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisa Capaian				Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	87,5	87,8	88	89,19	92,1	90,6	95,5	
2.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik			81	81,5	82	82,5	92,5	90	72,5	71	
3.	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Liang Anggang

Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan

1. Masalah Pembangunan SDM

Permasalahan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah peningkatan kualitas aparatur dalam organisasi pemerintahan yang merupakan menjadi salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian, saat ini secara nasional. Hal ini tak lepas akibat dari masih banyaknya sumber daya aparatur pemerintahan yang bekerja sesuai dengan tingkat kompetensi latar pendidikan yang dimiliki sehingga menjadikan faktor utama dari kurang terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas pada bidangnya.

2. Masalah Pembangunan Birokrasi Pemerintah

Agenda utama yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kecamatan Liang Anggang yang menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sasaran pokoknya adalah : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara; berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan

1. Pembangunan sumber daya aparatur pelayanan publik yang kompeten sesuai dengan bidang.
2. Jumlah Aparatur Kecamatan dan kelurahan yang masih terbatas
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat.
4. Peningkatan Pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi
5. Peningkatan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan di wilayah Kecamatan Liang Anggang.

6. Pengembangan kawasan Produktif dengan pemanfaatan sumberdaya agro industry
7. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan perikanan, dan pusat kegiatan pengolahan hasil produksi;
8. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Permasalahan Sosial, dan kasus HIV/AIDS serta Penyalahgunaan narkoba.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Liang Anggang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru dimana yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
- c. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial, fasilitasi pendidikan, kehidupan keagamaan dan pembinaan mental spiritual;

- f. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelayanan masyarakat;
- g. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan;
- h. Pengelolaan Kesekretariatan.

Yang mana berdasarkan tugasnya tersebut Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam hubungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 dijelaskan bahwa susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi Pemerintah Kecamatan dalam bidang perencanaan dan penyusunan program, pelayanan urusan umum dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan kelurahan, pembinaan keagrariaan / pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta pembinaan politik dalam negeri.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pengamanan dan penegakkan peraturan daerah / peraturan perundang-undangan lainnya

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perekonomian rakyat, produksi dan distribusi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup.

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2009 tentang Uraian tugas Camat, Sekretaris, Kepala Sub. Bagian dan Kepada Seksi pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dijelaskan sebagai berikut :

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Kecamatan sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota dan Program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Mengkoordinasikan dan membina kerjasama dengan instansi/ unit kerja terkait termasuk dengan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan untuk memadukan program Kecamatan sesuai prosedur kerja untuk pelaksanaan tugas;
- c. Menkoordinasikan rencana kerja dan tugas-tugas bawahan khususnya Sekretariat dan Seksi-seksi dalam Kecamatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis demi kelancaran tugas;
- d. Menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi Kecamatan serta membina administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pembinaan personil di lingkungan Kecamatan;
- e. Memberikan disposisi, mengarahkan tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;

- f. Memberi petunjuk dan membina kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomankan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi dan monitor kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. Menyusun kebijakan, merumuskan sasaran mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan tugas, hasil tugas tepat sasaran;
- i. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat sesuai dengan program kerja Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan Keuangan, Perencanaan, Urusan umum dan Kepegawaian melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk penyusunan draft program kerja Kecamatan dan rencana anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan. Kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk urusan data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan karsi/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, DP3, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian serta urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan mengatur, mengawasi, mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pengelola Keuangan lainnya serta memonitor pelaksanaan program dilingkungan Kecamatan;

- e. Memberi saran/telaahan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan program kerja Sekretariat Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan penyusunan draft program kerja Pemerintahan Kecamatan dan rencana anggaran, pengelola anggaran dan pelaporan. Mengawasi bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya serta monitoring pelaksanaan program dilingkungan Kecamatan melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing yang meliputi pengelolaan anggaran dan pelaporan. Tugas-tugas Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pengelola Keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya serta untuk kegiatan monitoring pelaksanaan program dilingkungan Kecamatan;
- d. Memberi petunjuk, membimbing dan mengontrol kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan;

- f. Mengevaluasi dan meneliti kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. Membuat laporan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi dilingkungan Kecamatan;
- i. Mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan;
- j. Memberi saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan surat, peralatan, inventarisasi, pemeliharaan barang, data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan kursi/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, DP3, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Mengkoordinasikan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang meliputi pengelolaan surat, peralatan, inventarisasi, pemeliharaan barang, data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan kursi/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, DP3, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian;

- d. Memberikan petunjuk membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Mengevaluasi dan meneliti kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan program kerja Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan administrasi kependudukan, pelaksanaan penyusunan sistem pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pengelolaan administrasi/rekomendasi pertanahan melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi kependudukan;
- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- e. Mengevaluasi dan meneliti kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. Memberikan saran/telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/ kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan program kerja kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang meliputi Pembinaan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Membagi tugas kepada bawahan yang meliputi tugas-tugas Pembinaan ekonomi menengah kebawah, pembinaan pelaksanaan pembangunan pemberian izin mendirikan bangunan, izin tempat usaha skala kecil menengah, konservasi alam, migas, kelistrikan, Pembinaan Pasar tradisional, koperasi, usaha kecil dan menengah, di wilayah kecamatan;
- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Membuat dan mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. Mengevaluasi dan meneliti kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. Memberikan saran / telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Pada Pasal 8 disebutkan bahwa Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan program kerja Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait yang meliputi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kecamatan melalui rapat konsultasi atau koordinasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Membagi tugas kepada bawahan yang meliputi Pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan dibidang Kamtibmas, koordinasi penegakan Perda dan ketentuan lainnya, koordinasi penanganan wilayah, pemberian rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan mengumpul orang banyak (izin keramaian) di wilayah Kecamatan;
- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan, serta mengkoordinir, mengawasi dan mengarahkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Kecamatan, sesuai dengan tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Membuat dan mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. Mengevaluasi dan meneliti kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. Memberikan saran/telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Pada Pasal 9 disebutkan bahwa Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan program kerja Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang meliputi Pembinaan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan melalui rapat koordinasi dan konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan yang meliputi pembinaan, monitoring perkembangan penyelenggaraan Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kewanitaan, Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan bantuan sosial bagi warga tidak mampu, korban bencana dan orang terlantar, pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis kemerdekaan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pelaksanaan penyuluhan sosial dan pendataan masalah kesejahteraan sosial dan potensi kesejahteraan sosial, pendistribusian Raskin dan Kematian serta pembinaan pelayanan rekomendasi nikah, pergi haji, pengangkatan PPN dan legalisasi Surat Keterangan Miskin di wilayah Kecamatan;
- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Membuat dan mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. Mengevaluasi dan meneliti kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. Memberikan saran/telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kecamatan Liang Anggang. Tahun 2025 dengan kebutuhan riil Kecamatan Liang Anggang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kecamatan Liang Anggang.

Tahun 2025 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Liang Anggang. Review tersebut digambarkan pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Liang Anggang
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Banjarbaru

Kecamatan Liang Anggang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN				9.417.606.132				9.936.706.765
	KECAMATAN				9.417.606.132				9.936.706.765
7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275.397.600				268.647.297
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN LIANG ANGGANG	3 Dokumen	15.000.000	APBD KOTA BANJAR BARU		3 Dokumen	8.249.697
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	260.397.600			2 Laporan	260.397.600
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.485.973.932				7.553.332.798
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima		54 Orang/bulan	6.471.311.932			54 Orang/bulan	7.553.332.798

	ASN	Gaji dan Tunjangan ASN							
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	10.000.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4.662.000			4 Laporan	4.662.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.980.500				
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	3.980.500			4 Laporan	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.193.100				138.936.670
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	15.410.000			3 Paket	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	83.669.500			6 Paket	89.244.170
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	6.917.600			2 Paket	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.980.000			1 Dokumen	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	44.216.000			4 laporan	49.692.500

KECAMATAN LIANG ANGGANG

APBD KOTA BANJAR BARU

7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			291.478.000			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	78.117.000		1 Tahun	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	213.361.000		1 Tahun	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.580.000			
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah			253.207.800		100 %	181.207.800
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	72.000.000			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	181.207.800		5 Laporan	181.207.800
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			227.000.500			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	69.524.000		1 Unit	

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	92.226.500			7 Unit	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	5.050.000			5 Unit	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	60.200.000			1 Unit	
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ditingkat kecamatan				1.516.047.000				1.517.047.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN LIANG ANGGANG	10 Dokumen	1.516.047.000	APBD KOTA BANJAR BARU		10 Dokumen	1.517.047.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				153.093.000				154.743.000
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		10 Dokumen	35.550.000			10 Dokumen	35.750.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		10 Laporan	81.993.000			10 Laporan	82.993.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10 Laporan	35.550.000			10 Laporan	36.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12.821.000				11.000.000
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	12.821.000			1 Laporan	11.000.000

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				121.343.000				115.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		12 Lembaga Kemasyarakatan	121.343.000			12 Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				178.278.500				178.000.000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	178.278.500			2 Laporan	178.000.000
J U M L A H					9.731.393.932				

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2025 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun lintas sektor. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan Liang Anggang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Banjarbaru

Kecamatan Liang Anggang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nihil					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LIANG ANGGANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Liang Anggang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaanserta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Liang Anggang selama 5 tahun tercantum pada misi 3 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan”. Tujuan

tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey dan Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.

Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Liang Anggang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey.
- Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah RT Mandiri dengan pengukuran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RT Mandiri.

3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Kelurahan.

Tujuan utama dari Pemerintah Kecamatan Liang Anggang adalah Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Liang Anggang adalah :

- Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat.
- Pelayanan publik menerapkan Standar Pelayanan Prima yang terintegrasi secara online.
- Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disajikan dalam renja ini sudah melalui mekanisme yang semestinya atau merupakan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan Kantor Camat Liang Anggang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kantor Kecamatan Liang Anggang.

Program dan kegiatan pada Renja Kantor Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program dan kegiatan renja SKPD 2025 kami sajikan dalam tabel lampiran renja ini.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Liang Anggang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Liang Anggang. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
Kecamatan Liang Anggang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5 (Baik)
		b. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	46
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LIANG ANGGANG

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Keseluruhan Rencana Kerja yang akan dikelola Kecamatan Liang Anggang selama tahun 2025 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Liang Anggang. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Liang Anggang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Banjarbaru selama tahun 2021-2026

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Rencana Kerja Kecamatan Liang Anggang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa rencana kerja dimana rencana kerja itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN LIANG ANGGANGKOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2023	Prak iraa n Cap aian Targ et REN JA OPD Tah un 202 4	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasi onal	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						KECAMATAN LIANG ANGGANG						9.731.393.932,00						10.117.914.565,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.417.606.132,00							9.936.706.765,00		
	7	01				KECAMATAN						9.417.606.132,00							9.936.706.765,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-			BB Nilai	7.436.023.632,00						-	7.960.916.765,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	275.397.600,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang	-	268.647.297,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.000.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang		8.249.697,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	260.397.600,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang		260.397.600,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.485.973.932,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang	-	7.553.332.798,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	6.471.311.932,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang		7.553.332.798,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4.662.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.980.500,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	3.980.500,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	152.193.100,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	138.936.670,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	15.410.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	83.669.500,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		89.244.170,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.917.600,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.980.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	44.216.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		49.692.500,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	291.478.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	78.117.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	213.361.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	227.000.500,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	69.524.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	92.226.500,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5.050.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.200.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Liang Anggang) Indeks Kepuasan Masyarakat (Liang Anggang)	83Nilai 83,5Nilai 83,5Nilai 81,5Nilai 90Nilai 90Nilai 83,5Nilai 83Nilai 90Nilai 90Nilai 88,5Nilai 87,5Nilai 88,5Nilai 4Nilai 83,5Nilai 83,5Nilai 90Nilai 88Nilai 88,5Nilai			83 Nilai 88,5 Nilai	1.669.140.000,00						83Nilai 83,5Nilai 83,5Nilai 83,5Nilai 81,5Nilai 90Nilai 90Nilai 83,5Nilai 83Nilai 90Nilai 90Nilai 88,5Nilai 87,5Nilai 88,5Nilai 4Nilai 83,5Nilai 83,5Nilai 90Nilai 88Nilai 88,5Nilai	1.671.790.000,00	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			10 Dokumen	1.516.047.000,00			-	-		Kecamatan Liang Anggang	-	1.517.047.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	1.516.047.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Kecamatan Liang Anggang		1.517.047.000,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	153.093.000,00			-		04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	154.743.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	35.550.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		35.750.000,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				10 Laporan	81.993.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		82.993.000,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					10 Laporan	35.550.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		36.000.000,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
3	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri (Liang Anggang)	48 RT			48 RT	134.164.000,00						48 RT	126.000.000,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tindak lanjut pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	-			100 %	12.821.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	11.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan															
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					1 Laporan	12.821.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		11.000.000,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 %	121.343.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang	-	115.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					12 Lembaga Kemasyarakan	121.343.000,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang		115.000.000,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
4	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang diselesaikan (Liang Anggang)	100 %			100 %	178.278.500,00						100 %	178.000.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		100 %	178.278.500,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang	-	178.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 Laporan	178.278.500,00	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kecamatan Liang Anggang		178.000.000,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	X					NON URUSAN					313.787.800,00							181.207.800,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					313.787.800,00							181.207.800,00	
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	-		100 %	313.787.800,00						-	181.207.800,00	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	60.580.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	0,00	
	X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	60.580.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	253.207.800,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	181.207.800,00	
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	72.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG	
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	181.207.800,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		181.207.800,00	KECAMATAN LIANG ANGGANG	
	J U M L A H											9.731.393.932,00								10.117.914.565,00	

BAB V

PENUTUP

Tersusunnya Penjelasan umum Rencana Kinerja Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja kedepan, sehingga program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi dengan baik sesuai jadwal kegiatan dan anggaran yang tersedia.

Rencana kerja Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan kantor dan administrasi perkantoran, serta sarana prasarana yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara umum dengan baik dan benar.

Dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana kantor, sumber daya manusia dan anggaran belanja yang diberikan kami tetap melaksanakan tugas semaksimal mungkin serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari Rencana Kinerja ini masih jauh dari harapan mengingat keterbatasan anggaran yang ada, oleh karenanya Rencana Kinerja tersebut selalu mengalami perubahan dan perbaikan setiap tahun untuk menuju kearah yang lebih baik.

Liang Anggang , Juli 2024

Camat Liang Anggang

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP

Pembina

NIP.19831229 200212 1 001